

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak negara di dunia menghadapi tantangan kemiskinan, termasuk Indonesia. Komitmen negara-negara tersebut tercermin melalui pengukuhan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs / TPB) yakni “*Tanpa Kemiskinan*”. Indonesia melalui Bappenas memadukan upaya tersebut dalam perencanaan pembangunan nasional guna memastikan bahwa tak satu pun warga tertinggal dalam capaian kesejahteraan (Bappenas, n.d.).

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai dimana sebuah kondisi individu atau kelompok tertentu tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dalam hal ini yang dimaksud kebutuhan dasar adalah pangan, air bersih, tempat tinggal, dan juga akses pendidikan dan layanan kesehatan (Hakim et al., 2024). Kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah tantangan yang multidimensi bukan hanya permasalahan atau isu ekonomi saja, dimana yang dimaksud multidimensi karena dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan juga stabilitas sosial (Rahman & Khumayah, 2024).

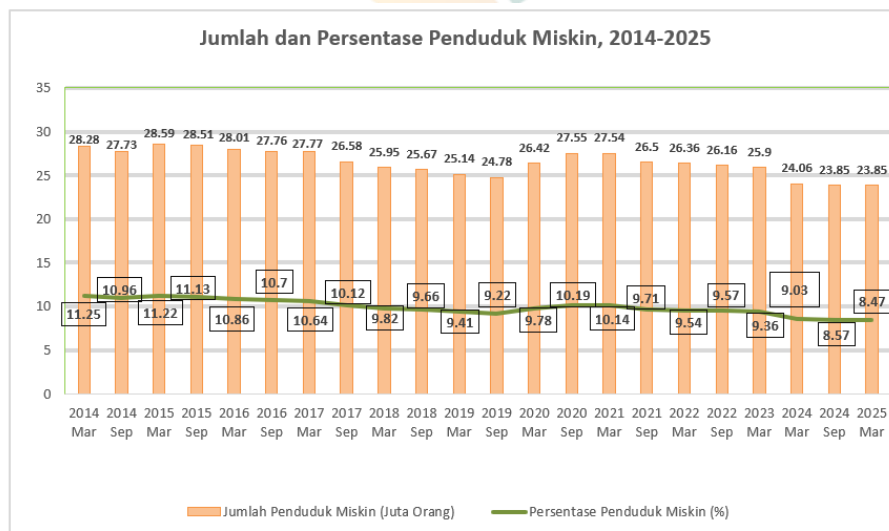
Menurut Harjadi & Fatmasari (2015) krisis ekonomi yang kerap terjadi menimpa Indonesia, membawa pengaruh negative dalam bentuk inflasi yang tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang negative, pendapatan riil masyarakat per kapita yang menurun drastis, jumlah pengangguran dan mengakibatkan tingkat kemiskinan yang meningkat tajam.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode Maret 2014 hingga Maret 2025. Secara umum, tren kemiskinan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan meskipun sempat mengalami

kenaikan pada tahun 2020–2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 28,28 juta orang atau 11,25% dari total populasi, kemudian terus menurun hingga mencapai 24,78 juta orang (9,22%) pada September 2019. Namun, pandemi menyebabkan angka kemiskinan kembali meningkat, mencapai puncaknya pada September 2020 dengan 27,55 juta orang atau 10,19%. Setelah masa tersebut, angka kemiskinan berangsur menurun kembali, dan pada Maret 2025 tercatat sebesar 23,85 juta orang dengan persentase 8,47%. Angka ini menjadi yang terendah dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir, sekaligus menandakan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca pandemi. Perjalanan dinamika angka tersebut dapat dilihat lebih jelas pada grafik berikut (Badan Pusat Statistik, 2025).

Gambar 1. 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2014-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, pemerintah dihadapkan pada persoalan bagaimana menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warganya agar dapat hidup layak dan berdaya saing. Data BPS mencatat bahwa pada Juli 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 % dari total populasi, tren ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya (Badan Pusat

Statistik, 2025). Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai program untuk mengatasi masalah ini, kemiskinan tidak teratasi dengan baik bahkan menjadi masalah yang mendesak untuk segera diatasi.

Ekonomi merupakan faktor inti dan penompang dalam sebuah rumah tangga, menjadi bahan bakar untuk keberlangsungan rumah tangga karena semua kebutuhan dalam sebuah rumah tangga membutuhkan uang. Ketahanan ekonomi salah satunya diperlukan guna memelihara keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga. Ketahanan ekonomi didefinisikan sebuah kemampuan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi serta memelihara keberlangsungan standar hidup anggota keluarga guna mencapai kemandirian ekonomi (Rokhmah & Sari, 2024).

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada kelompok rumah tangga miskin yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Program perlindungan sosial berbasis *conditional cash transfer* seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar melalui bantuan tunai bersyarat yang mendorong akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, PKH berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga secara keseluruhan membantu memperbaiki situasi ekonomi keluarga penerima manfaat (Julfani & Putra, 2024).

Menurut Komalasari, Fatmasari & Suharto (2024) negara merupakan pemangku kewenangan tertinggi dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan bantuan yang dibuat pemerintah sebagai instrumen perlindungan sosial yang membantu keluarga miskin menstabilkan pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Pelaksanaan BPNT membantu mengurangi tekanan pengeluaran pangan di rumah tangga penerima manfaat dan memberikan dampak positif pada efisiensi pengeluaran keluarga, yang berkontribusi pada penguatan ketahanan ekonomi

keluarga terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan pendapatan (Salahuddin et al., 2025).

Ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pendapatan semata, tetapi juga dengan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan, mengelola pengeluaran, serta menghadapi guncangan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah berperan penting melalui berbagai program bantuan sosial yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga miskin dan rentan. Salah satu bentuk nyata kebijakan tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menjadi bagian integral dari sistem perlindungan sosial nasional. Program-program ini tidak hanya diorientasikan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk memperkuat daya tahan ekonomi keluarga melalui akses pangan yang lebih layak, peningkatan kapasitas pendidikan, serta dukungan kesehatan bagi anggota keluarga (Nadhifah, 2020).

Pemerintah Indonesia menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme bantuan non-tunai yang disalurkan secara rutin setiap bulan. Dana bantuan tersebut disalurkan ke akun elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok di toko atau agen yang telah bermitra dengan bank penyalur seperti Bank Himbara melalui sistem e-Warong (Rahman & Khumayah, 2024). Mekanisme penyaluran BPNT melalui akun elektronik juga memberikan ruang bagi pengendalian penggunaan dana sehingga KPM tidak dapat mencairkan bantuan dalam bentuk tunai dan harus memanfaatkan saldo bantuan sesuai tujuan program (Priono et al., 2022).

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin maupun kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017. Kehadiran BPNT diharapkan mampu mengubah pola pengeluaran rumah tangga, khususnya dengan mendorong peningkatan konsumsi pangan

sekaligus memenuhi kebutuhan nonpangan secara lebih seimbang (Forensa et al., 2024).

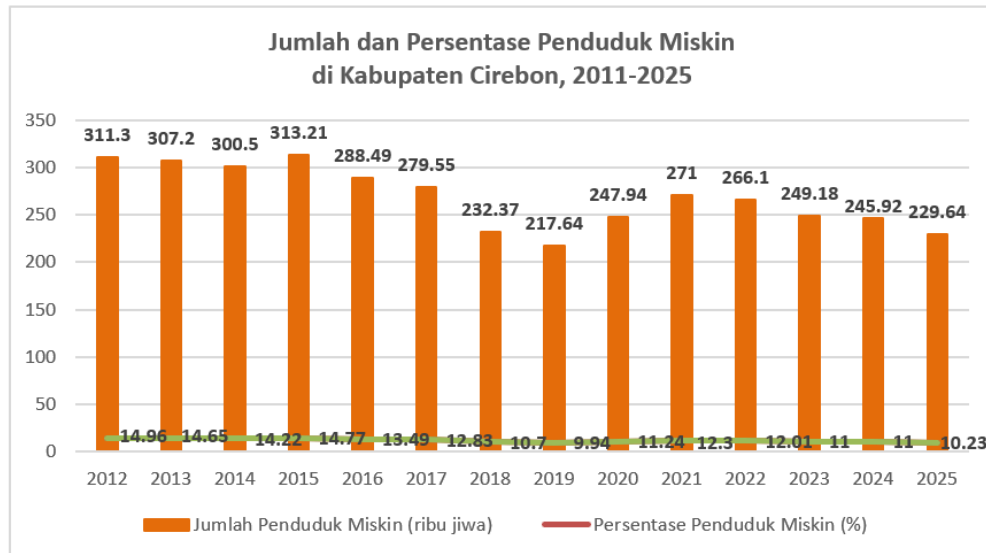
Transparansi dalam penyaluran bantuan sosial merupakan elemen penting dari prinsip *good governance*, karena memastikan bahwa proses alokasi, mekanisme distribusi, dan informasi terkait bantuan tersedia secara terbuka bagi publik dan pemangku kepentingan. Praktik transparansi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggara, mengurangi kesalahan sasaran (*mistargeting*), serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan publik. Peningkatan transparansi terutama melalui keterbukaan informasi dan sistem pelaporan yang jelas, dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan program sosial secara lebih efektif (Ripamonti, 2024).

Kabupaten Cirebon merupakan daerah bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang sangat beragam. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu kabupaten di pesisir utara Jawa Barat dengan karakter wilayah kombinasi pesisir dan dataran rendah yang memengaruhi pola pemukiman dan aktivitas ekonomi. Menurut BPS Kabupaten Cirebon, pada periode proyeksi terakhir jumlah penduduk Kabupaten Cirebon berada di kisaran lebih dari 2,3 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 1.076,76 km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2024). Kerapatan penduduk relatif tinggi dan struktur demografi menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil merupakan kondisi yang penting untuk perencanaan layanan publik dan penyaluran program kesejahteraan. Kondisi geografis turut menentukan aksesibilitas layanan, pasar, dan sarana distribusi di tingkat kecamatan/desa.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon cenderung menurun, baik dari segi jumlah maupun persentase, dari tahun 2011 hingga 2024. Tetapi, akibat dampak dari pandemi yang melanda Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon tahun 2020 angka kemiskinan meningkat. Gambar dibawah ini menunjukkan perubahan evolusi tingkat kemiskinan dari tahun 2011 hingga 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2024).

Gambar 1. 2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, 2011-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon di atas, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin periode 2011–2025 menunjukkan tren menurun meskipun disertai fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Pada 2011 tercatat sekitar 328,6 ribu jiwa atau 15,56% dari total penduduk berada dalam kategori miskin, angka ini berangsur turun hingga 2014 sebelum kembali meningkat pada 2015 sebesar 313,21 ribu jiwa (14,77%). Penurunan signifikan terjadi pada 2018–2019 dengan capaian terendah 217,64 ribu jiwa (9,94%).

Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kenaikan kembali pada 2020–2021 dengan puncaknya sebesar 271 ribu jiwa (12,3%). Setelah periode tersebut, kemiskinan berangsur menurun, yakni 249,18 ribu jiwa (11,20%) pada 2023, 245,92 ribu jiwa (11,00%) pada 2024, hingga proyeksi 229,64 ribu jiwa (10,23%) pada 2025. Pola ini mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi, kebijakan perlindungan sosial seperti BPNT dan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten 2025

PKH, serta penguatan intervensi pembangunan daerah meskipun masih terdapat kerentanan akibat guncangan eksternal.

Tabel 1. 1
Data Jumlah KPM Kecamatan Mundu

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Penerima BPNT	Jumlah Penerima PKH
1.	Mundu	Setupatok	767	610
2.	Mundu	Penpen	727	604
3.	Mundu	Mundu Mesigit	522	428
4.	Mundu	Luwung	477	367
5.	Mundu	Waruduwur	335	262
6.	Mundu	Citemu	391	300
7.	Mundu	Bandengan	277	216
8.	Mundu	Mundu Pesisir	540	404
9.	Mundu	Suci	375	279
10.	Mundu	Banjarwangunan	948	719
11.	Mundu	Pamengkang	342	275
12.	Mundu	Sinarancang	455	336
Total Penerima Sekecamatan			6.156	4.800

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 data dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon tahun 2025, Kecamatan Mundu merupakan salah satu wilayah dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT dan PKH yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain di wilayah pesisir timur Cirebon. Total penerima BPNT di Kecamatan Mundu tercatat sebanyak 6.156 keluarga, sedangkan penerima PKH mencapai 4.800 keluarga. Tingginya jumlah penerima tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Mundu masih menjadi daerah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang signifikan, sehingga sangat relevan untuk dikaji dalam

konteks pengaruh transparansi penyaluran bantuan, literasi keuangan, dan pemanfaatan program sosial terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Implementasi BPNT di Kabupaten Cirebon pada umumnya telah mengikuti pedoman nasional, namun masih menghadapi kendala seperti validitas data KPM dan keterbatasan akses e-Warong yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan. Seperti penelitian yang dilakukan di Desa Kubang, Kecamatan Talun, menunjukkan bahwa meskipun program berjalan sesuai ketentuan, hambatan berupa keterlambatan pencairan dan ketidakteraturan penyaluran berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, sehingga diperlukan perbaikan data dan penguatan koordinasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program (Hamdani & Rosmawati, 2022).

Penelitian lain mengenai BPNT dan PKH secara bersamaan dalam konteks penanggulangan kemiskinan di wilayah lain di Indonesia menunjukkan bahwa kedua program tersebut secara signifikan berkontribusi terhadap efektivitas pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Menurut (E. Y. Sari, 2025) BPNT dan PKH terbukti memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial rumah tangga miskin, meskipun tantangan pelaksanaan seperti koordinasi antar-instansi dan validasi data tetap menjadi isu yang harus diatasi .

Meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji BPNT dan PKH dari sisi efektivitas program, implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kajian tersebut umumnya bersifat parsial dan belum banyak mengintegrasikan aspek transparansi penyaluran bantuan, literasi keuangan keluarga, dan pemanfaatan program bantuan sosial sebagai faktor yang secara simultan memengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga. Selain itu penelitian yang menguji keterkaitan ketiga aspek tersebut pada level lokal masih terbatas, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi spesifik seperti Kecamatan Mundu, Kabupaten

Cirebon. Oleh karena itu penelitian ini mengisi celah kajian dengan menganalisis secara komprehensif peran transparansi BPNT, literasi keuangan keluarga, dan pemanfaatan PKH dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga penerima manfaat.

Dalam pandangan lain terdapat kesenjangan antara tujuan program bantuan sosial dengan kondisi masyarakat penerima manfaat. BPNT idealnya disalurkan secara transparan dan dipahami oleh KPM, namun sebagian masyarakat masih belum memahami proses penyaluran dan kriteria penerima bantuan. Literasi keuangan juga seharusnya membantu keluarga dalam mengelola bantuan secara tepat, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mampu mengatur keuangan keluarga secara baik. Selain itu, PKH idealnya dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, tetapi pemanfaatannya belum selalu terarah pada penguatan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi penyaluran BPNT, literasi keuangan, dan pemanfaatan PKH terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparaansi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Literasi Keuangan, dan Pemanfaatan PKH terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang menjadi fokus penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah masih belum diketahuinya apakah ada pengaruh atau tidak antara BPNT, Literasi Keuangan dan PKH terhadap Ketahanan Ekonomi di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, diperlukan batasan masalah yang jelas agar pembahasan tidak meluas dan tetap terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu untuk menjaga fokus analisis terhadap hubungan antar variabel yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel independen, yaitu transparansi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), literasi keuangan, dan pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH), yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu ketahanan ekonomi keluarga.
2. Penelitian ini tidak membahas faktor eksternal lain seperti tingkat pendidikan, kondisi pekerjaan, jumlah tanggungan, maupun faktor sosial-budaya yang dapat memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga, karena berada di luar fokus variabel penelitian.
3. Subjek penelitian dibatasi pada keluarga penerima manfaat (KPM) program BPNT dan PKH yang berdomisili di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, sebagai representasi wilayah dengan karakter sosial ekonomi masyarakat pesisir, perdesaan dan juga semi-perkotaan.

4. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer melalui penyebaran kuesioner kepada KPM serta data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan Badan Pusat Statistik (BPS).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan proses identifikasi dan penjabaran dari inti permasalahan atau pertanyaan yang akan menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian atau studi. Ini adalah pernyataan yang jelas dan terperinci yang menggambarkan persoalan yang ingin diselesaikan atau diteliti dalam suatu kajian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh transparansi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan PKH terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana pengaruh transparansi penyaluran BPNT, literasi keuangan, dan pemanfaatan PKH secara simultan terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian.

Berdasarkan rumusan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan PKH terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi penyaluran BPNT, literasi keuangan, dan pemanfaatan PKH secara simultan terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai media atau sarana untuk menerapkan ilmu, memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mengamati secara langsung ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan mundu. Penelitian ini juga berguna untuk wadah dalam hal mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama di perkuliahan melalui praktik langsung di lapangan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat umum tentang pangaruh Bantuan Pangan Non Tunai, Literasi Keuangan, Program Keluarga Harapan terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini merupakan sejalan dengan konsep pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,

terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada program studi Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi institusi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji topik yang serupa.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait dengan ketahanan ekonomi rumah tangga dan efektivitas program perlindungan sosial di tingkat lokal. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang hubungan antara transparansi kebijakan publik, literasi keuangan, serta pemanfaatan bantuan sosial terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji efektivitas program bantuan sosial, sehingga dapat memperluas kerangka konseptual mengenai bagaimana instrumen kebijakan sosial-ekonomi mampu berperan dalam mengurangi kerentanan masyarakat miskin dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk menjadi kerangka dan pedoman penulisan dalam skripsi, agar lebih mudah untuk dilihat dan dipahami pembahasan yang tercakup dalam pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan bagi pembaca. Berikut ini adalah penulisan sistematis:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum permasalahan penelitian dan kondisi aktual kemiskinan dan peran program bantuan sosial (BPNT dan PKH) di Kabupaten Cirebon, khususnya di Kecamatan Mundu. Berisikan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Tujuan

utama bab ini adalah menggambarkan arah dan urgensi penelitian secara komprehensif.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori dengan kajian teori yang membahas tentang masing-masing variabel Independen dan Variabel dependen, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, metode dan pendekatan penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan data empiris, hasil analisis statistik, serta pembahasan hubungan antara variabel berdasarkan teori yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya dan implikasi secara teoritis, praktik, serta saran-saran.